

Abu Janda Ungkap Keinginannya Bertemu Natalius Pigai

JAKARTA (IM) - Permadi Arya atau Abu Janda mengungkapkan keinginannya bertemu eks komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Hal ini berkaitan dengan cuitannya di Twitter yang menyebut kata "evolusi" saat merespons cuitan Natalius Pigai yang mengkritik eks Kepala BIN Hendropriyono. "Saya juga ingin ya. Makanya ini urusan saya sama Bang Pigai, kok jadi orang yang melapor. Mungkin aku ada keinginan ya, tapi gimana Bang Pigai berkenan," kata Permadi sesuai diperiksa di Bareskrim Polri, Kamis (4/2).

Namun, Permadi mengaku hingga saat ini belum berkomunikasi dengan Natalius Pigai. Ia mengaku reaktif ikut merespons kritik Natalius Pigai terhadap Hendropriyono karena ia kagum dengan sosok mantan Ketua Umum PKPI itu.

Abu Janda mengatakan, jika memang cuitannya mengandung hinaan, itu semestinya menjadi urusan ia dan Natalius Pigai.

Sementara itu, laporan dugaan ujaran rasialisme ini dilayangkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

"Ada pelanggaran, saya setuju. Saya menghina Pigai setuju. Tapi itu delik aduan Pigai ke saya. Jangan dilebar-kan ke mana-mana. Kalau ada indikasi saya menghina Pigai, saya setuju. Tapi selain itu tidak. Selain itu sudah pengeringan opini dan pelitiran," ucapnya.

Ia menegaskan, sebagaimana telah ia sampaikan kepada penyidik, kata "evolusi" yang dimaksud dirinya menasar kepada cara pikir Natalius Pigai. Permadi membantah kata "evolusi" yang digunakannya bermaksud menyerang fisik. ● mei

Kemendagri Pertimbangkan untuk Menunda Lantik Bupati Sabu Raijua

JAKARTA (IM) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan usul Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda pelantikan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Riwu Kore. Pasalnya Orient berstatus warga negara Amerika Serikat (AS).

"Solusi Bawaslu menjadi opsi yang mungkin akan kami pertimbangkan kepada Bapak Menteri," kata Akmal dalam konferensi persnya yang disiarkan secara daring, Kamis (4/2).

Akmal menegaskan, pihaknya sangat menghormati proses demokrasi yang ada di Kabupaten Sabu Raijua. Namun, adanya beberapa fakta yang merujuk kemungkinan Orient adalah warga negara

AS juga tidak bisa dikesampingkan.

"Harus kita antisipasi agar nanti ketika proses pilkada ini selesai. Dan bermuara pada pengesahan pasangan calon, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujarnya.

Kendati demikian, Akmal mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan apa sebenarnya kewarganegaraan Orient. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait status kewarganegaraan tersebut pada otoritas yang berwenang.

"Dalam waktu yang singkat kami akan segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Dan kami berharap dalam waktu cepat Bapak Menteri akan segera mengambil keputusan," ucapnya. ● han

KPU: Idealnya UU Pemilu Disahkan 2,5 Tahun Sebelum Pemilu Dimulai

JAKARTA (IM) - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membeberkan kriteria ideal bahwa Undang-undang (UU) Pemilu seharusnya disahkan 2,5 tahun sebelum penyelenggaraan Pemilu dimulai. Dengan demikian, KPU dapat membuat peraturan KPU (PKPU) lebih maksimal karena waktu yang lebih panjang.

"Bagaimana yang ideal, tentu saja, buat kami sebagai penyelenggara Pemilu, at least paling tidak 2,5 tahun sebelum Pemilu dimulai," kata Ilham dalam diskusi daring Fraksi Partai Nasdem DPR RI bertema "Urgensi RUU Pemilu Dalam Memperkuat Demokrasi", Kamis (4/2).

Selama ini menurut Ilham, KPU merasa tergesa-gesa dalam membuat peraturan KPU (PKPU). Ia mengatakan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 disahkan pada Agustus 2017. Praktis KPU hanya memiliki waktu 1 tahun 6 bulan untuk membuat PKPU Pemilu 2019.

"Pengalaman lalu, kami ketika dilantik pada bulan April 2017. Lalu UU Pemilu yang baru masih dalam pembahasan. Padahal ketika itu hampir 2 tahun jelang Pemilu. Sehingga waktu kami untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 itu hanya relatif kira-kira satu tahun 6 atau 7 bulan. Kami tergesa dalam membuat peraturan KPU, membuat tahapan-tahapan untuk menjalankan amanah

UU 7/2017 " jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ilham menegaskan sikap KPU untuk tetap mengacu pada UU Pemilu dan Pilkada yang ada. KPU, kata dia, tidak ingin terjebak dalam perdebatan yang ada terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"KPU sebagai penyelenggara tentu akan patuh terhadap UU yang ada. Saat ini dalam perspektif Pemilu, KPU tetap mengacu pada UU 7/2017. Dalam perspektif Pilkada, KPU tetap mengacu pada UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016," tegas Ilham.

"Sekali lagi, KPU hanya bekerja menyelenggarakan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada," lanjutnya.

Ilham mengaku tak ambil pusing dengan perdebatan yang ada apabila pelaksanaan Pilkada dan Pemilu dilakukan serentak pada 2024. Menurutnya, KPU tetap akan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tentang Pemilu dan Pilkada. Adapun dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan Pemilu.

"Jadi kalau mau Pemilu 2024, Pilkada 2024, tentu KPU sebagai penyelenggara Pemilu tetap patuh dan bekerja pada peraturan perundang-undangan yang ada," jelasnya. ● mei

IDN/ANTARA



RENCANA VAKSINASI COVID-19 PEDAGANG PASAR Pedagang melayani pembeli di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/2). Kementerian Kesehatan menyatakan akan menasar pedagang pasar dalam proses vaksinasi awal pada tahap dua yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat pelayan publik.

2 Polhukam

IDN/ANTARA



ANGGARAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 2021 NAIK

Pedagang mengangkut pakaian di Pasar Tasik, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (4/2). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang saat ini berada di level Rp533,1 triliun akan meningkat hingga Rp619 triliun.

Setelah Dibubarkan, Kini FPI Diterpa Rentetan Kasus Dugaan Terorisme

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, 19 tersangka teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Makassar merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI).

JAKARTA (IM) - Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) masih jadi pembicaraan dimasyarakat. Soalnya, ormas yang dipimpin Habib Rizieq Shihab (HRS) setelah dibubarkan pemerintah pada akhir Desember 2021, kini muncul tuduhan bahwa FPI diduga terlibat jaringan terorisme.

Tuduhan terlibat terorisme ini muncul setelah Bareskrim Polri melakukan penyelidikan atas aliran dana FPI yang

dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dimana, dalam gelar perkara, penyidik Bareskrim melibatkan tim Densus 88.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut, Densus 88 untuk mendalami segala kemungkinan. Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari Rekening organisasi FPI.

Di tengah penyidikan, me-

dia sosial twitter kini diramikan tulisan "Munarman" dan menjadi trending Indonesia di media sosial twitter, Kamis (4/2).

Lebih dari 1.900 warganet bahas FPI teroris melalui tulisan "Munarman". Hal itu disebabkan beredarnya video pernyataan tersangka teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 6 Januari 2021.

Video berdurasi 1.41 detik itu berisi pernyataan tersangka bernama Ahmad Aulia yang mengaku ditangkap karena beribadat kepada daulatul islam dibawah pimpinan Abu Bakar Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung daulatul islam pada Januari 2015.

"Saya beribadat bersama

dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di Markas FPI Makassar dan dihadiri oleh Munarman selaku pengurus pusat FPI pada saat itu. saya juga mengikuti taklim FPI sebanyak tiga kali," demikian pernyataan di video tersebut.

"TANGKAP MUNARMAN dan Gerombolan Teroris lainnya. Tangkap juga oknum ustadz-ustadz begundal teroris berubah agama yang merusak nama Islam!

Bagi yg takut bersuara melawan radikalisme atau cuma mau nyari aman, dilarang keras me-retweet atau me-like cuitan ini!," tulis @yusuf_dumdum

"Tweeps Bantu VIRAL kan Video 100 Laskar FPI Mendukung Baiat anggota TERORIS kelompok Al Baghdadi Di MAKASAR yg di hadiri MUNARMAN FPI," ajak akunRD_4WR1212

Sementara itu, Karo Penmas Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, 19 tersangka teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Makassar merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI). Para tersangka teroris

itu telah dijemput tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (4/2) siang.

"Semua terlibat atau menjadi anggota FPI di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan FPI di Makassar," kata Rusdi dalam konferensi pers di Bandara Soetta, Tangerang, Banten.

Menurut dia, kelompok teroris dari Makassar ini memiliki berbagai rencana yang bisa mengganggu stabilitas serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Kelompok ini biasanya melakukan aksi bom bunuh diri.

Rusdi mengatakan, salah satu dari 19 tersangka teroris kelompok Makassar ini merupakan anak pasangan suami istri Rullie Rian Zeke dan Ulifah Handayani. Mereka adalah pelaku bom bunuh diri di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan.

"Kelompok ini mempunyai ke mental untuk melakukan kegiatan-kegiatan bom bunuh diri," ujar Rusdi. ● han

Kontak Senjata Terjadi di Intan Jaya, Seorang Anggota KKB Tewas

JAYAPURA (IM) - Kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terjadi di Distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Kamis (4/2). Danrem 173/PVB Brigjen Iwan Setiawan membenarkan kontak senjata tersebut. Kontak senjata yang pecah di wilayah Titigi itu menewaskan seorang anggota KKB.

"Satu anggota KKB meninggal dengan barang bukti satu handy talkie dan ponsel," kata Iwan saat dihubungi, Kamis (4/1).

Iwan mengatakan, anggota KKB yang terlibat dalam kontak senjata itu sekitar tiga orang. Sementara dua anggota KKB lainnya kabur dan membawa senjata milik rekannya yang tewas. "Senjatanya dibawa kawannya lari, kita masih berupaya melakukan pengejaran," kata Iwan.

Dandim 1705/Nabire Letkol Inf Benny Wahyudi menambahkan, kontak senjata itu terjadi pada pagi hari. "Informasinya kontak senjata terjadi jam 05.30 sampai jam 06.00 WIT," katanya.

Benny belum bisa memastikan kronologi kontak senjata tersebut.

"Kronologi saya belum tahu pasti karena saya masih menunggu informasi pasti dari atas (Intan Jaya)," katanya.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mereka juga mengeluarkan ajakan perang terbuka terhadap aparat TNI-POLRI di wilayah tersebut.

Tantangan perang terbuka itu ditanggapi Wakapolda Papua Brigjen Matus Fakhiri. Matus menegaskan, TNI dan Polri tak takut dengan tantangan itu.

"Saya pastikan kalau ajak perang TNI-Polri tidak takut, kita akan hadapi. Cuma kan kita tidak mau ada dampak lain yang akan timbul bila kita mengambil langkah tegas dan terukur yang nantinya bisa di politisasi dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin suasana di papua ini selalu kisruh," kata Matus di Jayapura, Selasa (2/2).

Pada Rabu (3/2), sejumlah warga dari Kampung Ndogusiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, mengungsi karena takut dengan aktivitas KKB.

Dandim 1705/Nabire Letkol Inf Benny Wahyudi membantah kabar yang menyebut anggota TNI memaksa warga Ndogusiga mengungsi. "Kalau disebutkan ada massa yang meninggalkan rumah itu bukan TNI-Polri yang minta, yang benar adalah Anggota DPRD Intan Jaya, Benyamin Weya, dia menyampaikan ke masyarakat bahwa situasi tidak aman kita tinggal dulu di tempat lain, itu di Kampung Ndogusiga," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (3/1). ● mei



PEMERIKSAAN WAKIL BUPATI TERPILIH OGAN ILIR

Wakil Bupati terpilih Kabupaten Ogan Ilir (OI) Ardani (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Palembang, Kamis (4/2). Ardani diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2015 dan 2017 senilai Rp130 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Ini Bocoran Hasil Rapat Presiden Jokowi dengan 5 Gubernur

JAKARTA (IM) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin 'membocorkan' sedikit, isi rapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lima gubernur yang berlangsung pada Rabu (3/1).

Presiden Jokowi mengundang lima gubernur untuk berdiskusi tentang penanganan pandemi Covid-19. Budi ikut dalam rapat tersebut untuk mendampingi Kepala Negara.

Budi menuturkan, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu yakni cara-cara yang dilakukan negara-negara sahabat dalam mengatasi pandemi korona, seperti di Tiongkok, India, dan beberapa negara lainnya.

"Bapak Presiden kemarin mengundang lima gubernur untuk berdiskusi mengenai pandemi Covid-19 ini. Saya kebetulan diminta mendampingi beliau dan melihat bagaimana kita bertukar pengalaman, melihat bagaimana Cina bisa mengatasi pandemi ini," kata Budi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/2).

"(Kemudian) India bisa mengatasi pandemi dan beberapa kota di lim gubernuran tersebut juga bisa ternyata mengatasi pandemi ini," kata Budi menambahkan.

Diskusi antara Presiden Jokowi dengan lima gubernur

mengambil satu kesimpulan, yakni bagaimana cara terbaik untuk mengurangi laju penularan virus korona.

"Kesimpulan kami satu, cara untuk mengatasi pandemi ini adalah dengan mengurangi laju penularan," ucap Budi.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membicarakan program vaksinasi yang harus dipersiapkan dengan baik. Dengan vaksinasi maka itu akan meningkatkan kekebalan kelompok yang ujunhnya akan mengurangi beban fasilitas kesehatan.

"Agar kita bisa mempersiapkan lebih baik, sarana kesehatannya ada, agar seluruh rumah sakit kita juga tidak terlalu terbebani dan juga kita bisa menyiapkan diri dengan program vaksinasi. Tetapi misi utamanya perang menghadapi pandemi ini adalah mengurangi laju penularan," katanya.

"Dan dari hasil diskusi kemarin dilihat banyak program yang sudah dilakukan seperti Jogo Tonggo, program Kampung Tangguh, program Desa Siaga yang dilakukan teman-teman di kabupaten kodya dan di desa-desa di provinsi-provinsi, yang sebenarnya sangat erat dengan budaya asli Indonesia dan sangat tepat untuk menjawab bagaimana kita mengatasi pandemi ini dengan mengurangi laju penularan virus ini," kata Budi.

Sebagaimana diketahui, lima kepala daerah yang mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. ● mei

PENGUMUMAN PEMBUBARAN PT. DUHAO INDO JAYA ("Perseroan")

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2021 telah ditandatangani suatu Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT.DUHAO INDO JAYA yang agendanya adalah memutuskan untuk membubarkan Perseroan dan menunjuk likuidator sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pembubaran Perseroan atau memiliki tagihan terhadap Perseroan dapat menyampaikan keberatan atau tagihannya kepada Likuidator Perseroan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini dengan alamat sebagai berikut:

Jalan Raya Pasarkemis Nomor 62 Kp Cilongok, RT.009, RW.003 Sukramantri Pasarkemis, Kabupaten Tangerang Banten.

Dengan tembusan kepada Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.

ANG HANDI (Likuidator)
Tangerang, 05 Februari 2021
PT. DUHAO INDO JAYA

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Kami Direksi PT TIGA PELANGI CEMERLANG, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Perseroan), dengan ini mengumumkan keberatan secara tertulis ke alamat administratif kantor Perseroan di Plaza 88 Kota Casablanca Office Tower A-38 Floor, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada keberatan yang akan dilayani.

Jakarta, 5 Februari 2021
Direksi
PT TIGA PELANGI CEMERLANG

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN PT MANDIRA GARINDO LOGISTICS

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini dimumkan kepada semua pihak dan karyawan bahwa adanya rencana pengambilalihan atas saham-saham milik PT MANDIRA GARINDO LOGISTICS ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat.

yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan. Bagi Kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT MANDIRA GARINDO LOGISTICS
Jl Jogle Raya Komp Ruko Puri Botanical Blok H7/21 Jogle-Kembangan Jakarta Barat

Jakarta, 05 Februari 2021
Direksi
PT MANDIRA GARINDO LOGISTICS